

ABSTRAK

Perkembangan sektor pariwisata sangatlah pesat, peran UMKM menjadi semakin penting dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi hukum masih menjadi isu yang signifikan, salah satunya terhadap aturan pendaftaran izin usaha dan kewajiban membayar pajak daerah. Hal ini menjadi penting bagi pelaku usaha UMKM guna untuk memastikan usaha mereka resmi memiliki izin dan mendukung pembangunan negara.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menganalisis tentang kepatuhan hukum UMKM sektor pariwisata tentang kewajiban dalam melakukan perizinan usaha serta peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu kepatuhan hukum UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum di Café Aola bahwa sebagian besar telah memenuhi ketentuan peraturan terkait pendaftaran izin usaha. Dari total 9 (sembilan) UMKM yang diteliti, sebanyak 5 (lima) di antaranya telah berhasil memperoleh izin resmi, yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta izin dari Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa UMKM yang belum memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Sedangkan peran Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan melalui program sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Dinas berfokus pada peningkatan pemahaman dan motivasi pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum – UMKM - Café Aola Kabupaten Lamongan

ABSTRACT

The development of the tourism sector is very rapid, the role of MSMEs is becoming increasingly important in supporting the local economy. However, the challenge in compliance with legal regulations is still a significant issue, one of which is the rules for registering business permits and the obligation to pay regional taxes. This is important for MSME business actors to ensure that their businesses officially have permits and support national development.

The research method used in this study is empirical juridical. This study analyzes the legal compliance of MSMEs in the tourism sector regarding the obligation to carry out business permits and the roles of the Lamongan Regency Government in assisting MSME legal compliance.

The results of the study indicate that legal compliance at Café Aola is that most have met the provisions of regulations related to business permit registration. Of the total 9 (nine) MSMEs studied, 5 (five) of them have succeeded in obtaining official permits, which include the Business Identification Number (NIB), Trade Business License (SIUP), and permits from the Health Office. However, there are several MSMEs that have not met the licensing requirements. Meanwhile, the role of the Lamongan Regency Government, through socialization programs and assistance in managing business permits such as Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates. Although various efforts have been made, the awareness of MSME actors regarding the importance of business legality is still relatively low. Therefore, the Office focuses on increasing the understanding and motivation of business actors to fulfill their obligations.

Keywords: *Legal Compliance, MSMEs, Café Aola Lamongan Regency*